



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 11 Agustus 2020

Halaman: 5

Program "Menabung Tanah" Berhenti Sementara

YOGYA, TRIBUN - Program "Menabung Tanah" yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta harus terhenti untuk sementara waktu. Hal ini karena langkah pembebasan lahan di sejumlah titik mengalami kendala dalam hal anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogya, Edy Heri Suasana, pun mengakui, tahun ini pihaknya sudah mencapai kata sepakat dengan 3 pemilik tanah yang siap melepas 6 persil lahan. Ketiganya, berlokasi di daerah Pakuncen, Ngampilan, hingga Sorosutan.

"Ada 6 persil yang kami negosiasi. Sudah appraisal, pemilik tanah sudah diundang, tawar menawar clear, harga sudah diputuskan. Tapi, belum sampai eksekusi, kemudian ada pandemi, APBD lalu difokuskan ke dana tak terduga," ungkapnya, dikonfirmasi Senin (10/8).

Sekadar informasi, 'Menabung Tanah' telah digulirkan oleh Pemkot Yogya sejak beberapa tahun silam, sebagai bentuk antisipasi perkembangan daerah. Lahan yang dibebaskan itu, kemudian difungsikan untuk pembangunan fasilitas perkantoran, maupun ruang-ruang publik. Dalam program tersebut, pemerintah pun tak serta-merta mencari lahan untuk dibeli dan kemudian dieksekusi. Jadi, skemanya ialah masyarakat yang ingin menjual lahannya bisa mengajukan tawaran kepada Pemkot Yogya, untuk ditindaklanjuti dan diupayakan pembelinya.

Edy mengatakan, seandainya ketiga pemilik

lahan yang sudah mencapai kesepakatan memilih mundur dan menjual tanahnya ke orang lain, pihaknya tak punya wewenang untuk mencegah. Sebab, anggaran yang kini tersedia memang benar-benar tidak mencukupi.

"Kalau kemudian penjualnya itu memilih melepasnya ke tempat lain, ya sudah tidak apa. Kita masih ada beberapa penawar dari masyarakat yang lain," katanya.

Menurut Edy, meskipun jumlahnya tak terlalu banyak, ada beberapa proposal yang masuk ke instansinya, dari belasan masyarakat yang ingin menjual lahan pada Pemkot Yogya. Ia pun mengakui, minimnya proposal masuk ini karena adanya kekhawatiran terkait nilai jual tanahnya.

"Warga tentu berhitung saat menjual tanahnya, sehingga ada yang berasumsi, kalau dijual ke Pemkot nanti harganya murah. Makanya, mereka enggan menawarkan. Padahal, kami punya tim appraisal yang objektif," cetusnya. Lebih lanjut, ia mengungkapkan, anggaran pembebasan 6 persil lahan tersebut, saat ini sudah diusulkan untuk masuk anggaran tahun 2021 mendatang. Praktis, seandainya masih bersedia menunggu, pemilik lahan yang sudah mencapai kesepakatan, tidak perlu menunggu terlalu lama.

"Silakan saja, kalau mau lanjut, sesuai dengan harga yang kemarin. Tapi, kalau memang tidak sabar dan hendak dijual ke tempat lain, ya monggo. Anggaran sekitar Rp6 miliar ini sudah kami usulkan untuk alokasi tahun depan, di lokasi yang sama," pungkas Edy. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan			

Yogyakarta, 12 Agustus 2020
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005